

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. Seperti yang diungkapkan Sukirno (2000) dalam Winanda (2016), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses usaha dalam meningkatkan pemasukan atau pendapatan perkapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk riil. Hal ini dilakukan melalui lima tahap penting yaitu, penanaman modal, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengetahuan, dan pengelolaan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi. Dengan menggunakan kelima tahap tersebut, maka pembangunan ekonomi dapat berjalan dan tumbuh dengan baik. Pendapatan perkapita tersebut merupakan rata-rata penghasilan penduduk disuatu daerah.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2013).

Pada dasarnya suatu pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.Sukirno

(2012) menyebutkan bahwa kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum atau bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh dan taraf pendidikan yang dicapai, tingkat kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai.

Tagihan teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur(Jhingan,2013).

Dilihat dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal *productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi Gie (2002) dalam Maqin (2011).

Tabel 1.1**Perkembangan Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan) di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019**

Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Milyar)							
No	provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Provinsi
1	Aceh	112.665,53	116.374,30	121.240,98	126.824,37	132.074,25	121.835,89
2	Sumatera Utara	440.955,85	463.774,46	487.531,23	512.762,63	539.513,85	488.907,60
3	Sumatera Barat	140.719,47	148.134,24	155.984,36	163.966,19	172.213,79	156.203,61
4	Riau	448.991,96	458.769,34	470.983,51	482.064,63	495.598,10	471.281,51
5	Jambi	125.037,40	130.501,13	136.501,71	142.902	149.142,59	136.816,97
6	Sumatera Selatan	254.044,88	266.857,40	281.571,01	298.484,07	315.474,27	283.286,33
7	Bengkulu	38.066,01	40.076,54	42.075,52	44.164,11	46.435,45	42.163,53
8	Lampung	199.536,92	209.793,73	220.626,10	232.165,99	244.380,37	221.300,62
9	Kep. Bangka Belitung	45.962,30	47.848,37	49.985,15	52.208,04	53.940,42	49.988,86
10	Kep. Riau	155.131,35	162.853,04	166.081,68	173.498	181.895,86	167.891,99
Rata-rata Pulau Sumatera		196.111,17	204.498,26	213.258,13	222.904,00	233.066,90	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (diolah) 2021

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam waktu lima tahun (2015-2019) di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya, tertinggi pada tahun 2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mencapai 233.066,90 milyar rupiah dan dalam waktu lima tahun Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang laju pertumbuhan ekonominya terbesar dengan rata-rata 488.907,60 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Pulau Sumatera cukup baik dari tahun ke tahun akan tetapi hal tersebut juga perlu ditingkatkan dalam sumber daya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari SDA, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian skala produksi, dan pembagian kerja. Sedangkan faktor non ekonomi terdiri dari faktor sosial, faktor manusia, faktor politik, dan administratif (Todaro,2009). Menurut teori modern ada faktor-faktor lain yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu faktor ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum, stabilitas politik, kebijakan pemerintah dan birokrasi (Tambunan,2011 dalam Mustika, 2020).

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi suatu wilayah. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan pemukiman, serta air merupakan elemen elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur suatu negara bukti bahwa berkembangnya suatu negara. Tiga alasan utama yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur menurut integrasi ekonomi. Yang pertama, ketersediaan pembangunan infrastruktur yang awal atau baru sangat utama dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, banyaknya ketersediaan pembangunan infrastruktur mempengaruhi dalam pelancar aktivitas investasi dan perdagangan. Yang terakhir, bahwa perhatian yang penuh dalam hal perbaikan pembangunan dapat mengantisipasi infrastruktur perekonomian antar negara (Friawan,2008).

Sarana dan prasarana infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, karena sarana jalan digunakan untuk mempermudah konektivitas antar daerah dan memudahkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah lokal.

Tabel 1.2
Kondisi Jalan Kategori Baik di Pulau Sumatera (KM) Tahun 2015-2019

Kondisi Jalan (Km)						
No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1.334,08	741,78	823,430	1.948,58	1.297,35
2	Sumatera Utara	1.218,65	1.397,82	1.397,83	1.026,75	1.123,16
3	Sumatera Barat	1.224,08	362	279,58	230,98	234,3
4	Riau	1.150,94	1.278,21	1.384,54	1.003,86	1.320,26
5	Jambi	1.614,15	1.390,73	1.384,83	897,81	449,24
6	Sumatera Selatan	1.254,25	882,09	827,13	827,13	857,291
7	Bengkulu	371,86	371,86	708,27	635,64	688,30
8	Lampung	988221	988221	1091340	1140178	1121801
9	Kep. Bangka Belitung	926,5	965,11	918,87	938,89	2.644,79
10	Kep. Riau	333,99	469,73	478,43	409,90	400,60

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam angka, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat kondisi jalan yang ada di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera, di beberapa Provinsi yang berada di Pulau Sumatera kondisi jalan pada setiap tahunnya dari 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan kondisi jalan seperti halnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Aceh pada tahun 2015 kondisi jalan baik sepanjang 1.334,08 Km mengalami penurunan kondisi jalan pada tahun 2016 menjadi 741,78 Km. Hal ini dapat diindikasikan adanya kerusakan jalan yang ada pada Provinsi tersebut. Pada provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama yakni 2015 kondisi jalan kategori baik sepanjang 1.218,65 Km dan pada tahun berikutnya yakni 2016 mengalami kenaikan drastis sepanjang 1.397,82 Km, hal ini disebabkan adanya perbaikan jalan yang ada di Provinsi tersebut.

Infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Karena adanya infrastruktur jalan dapat mempermudah mobilitas barang maupun jasa dari daerah satu ke daerah lainnya.

Tabel 1.3
Listrik yang didistribusikan di Pulau Sumatera (GWh) tahun 2015-2019

Listrik Yang Terdistribusikan (GWh)						
No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2.119	2.208,13	2.409,11	2.587,71	2.781,50
2	Sumatera Utara	8.703,67	9.240,30	9.671,48	10.445,02	8.324,86
3	Sumatera Barat	3.063,28	3.055,62	3.415,49	3.496,18	3.445,08
4	Riau	3.586,45	3.904,72	4.069,39	4.377,21	4.646,79
5	Jambi	1.083,79	1.181,95	1.176,09	1.219,01	1.932
6	Sumatera Selatan	4.783,02	3.012,87	5.239,35	5.501,26	5.258,23
7	Bengkulu	785,43	824,87	852,84	907,45	955,47
8	Lampung	3.571,00	2.660,28	3.998,30	4.257,15	4.686,09
9	Kep. Bangka Belitung	861,52	935,57	979,19	1.066,35	1.166,93
10	Kep. Riau	2.694,79	2.329,12	2.823,17	2.990,44	3.346,31

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2021

Berdasarkan tabel 3.3 listrik yang telah terdistribusikan di provinsi yang ada di Pulau Sumatera cenderung mengalami kenaikan, hal ini menandakan bahwa listrik telah terdistribusi dengan baik di berbagai provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Namun, ada beberapa provinsi yang distribusi listrik mengalami penurunan seperti di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebesar 4.783,02 GWh menurun pada tahun 2016 sebesar 3.012,87 GWh dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 5.239,35 GWh begitu juga pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada setiap kenaikan atau peningkatan infrastruktur listrik menandakan bahwa PLN dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk

wilayah disetiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Adanya infrastruktur listrik merupakan salah satu bentuk energi final memegang peranan penting dalam mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.4
Jumlah Air Bersih Yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih (Ribuan M³)
Tahun 2015-2019

No	Provinsi	Jumlah Air Bersih Yang Disalurkan (M ³)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	35733	35733	34769	38389	47756
2	Sumatera Utara	307813	240840	304665	316639	310058
3	Sumatera Barat	71510	64550	84375	91365	91364
4	Riau	17.825	12.590	12.590	16.430	20.710
5	Jambi	46.372	26.607	34.508	41.755	40.393
6	Sumatera Selatan	161.960	118.666	162.051	146.106	153.782
7	Bengkulu	16.099	14.635	15.525	19.056	25.690
8	Lampung	17.685	17.685	16.536	16.297	18.181
9	Kep. Bangka Belitung	3.986	6.274	5.798	5.701	8.377
10	Kep. Riau	100514	318389	88179	93872	116252

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2021.

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran air bersih yang ada di Pulau Sumatera pada setiap Provinsi cenderung fluktuatif. Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan Provinsi terendah dalam penyaluran air bersih yang berada di Pulau Sumatera yakni sebesar 8.377m³ pada tahun 2019. Pada dasarnya, ketersediaan infrastruktur seperti air bersih merupakan suatu upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air bersih agar mampu berkehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Pengelolaan infrastruktur ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah secara serius karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas infrastruktur (Sjafrizal,2012).

Menurut Romer dalam teori endogen bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen atau bagian dari proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Simon Kuznet menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public servis obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara.

Menurut Brilyawan dan santoso (2021) dan Maya Panorama dkk (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini secara tidak langsung mendukung akan teori pertumbuhan ekonomi baru atau teori endogen. Namun disisi lain menurut Sugiarto dan Subroto (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam proses mempercepat pembangunan nasional. Infrastruktur diyakini sebagai salah satu roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari infrastruktur yang ada di Pulau Sumatera yakni infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan infrastruktur air yang cenderung bersifat fluktuatif namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun serta dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah

dipaparkan, Oleh sebab itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan diatas, terlihat bahwa pembangunan prasarana infrastruktur yang ada di Pulau Sumatera telah berlangsung cukup lama. Jadi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air mempunyai pengaruh terhadap output yang diwakili oleh variabel pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diketahui jenis prasarana infrastruktur yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Sumatera.

Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Dan Infrastruktur Air Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Dan Infrastruktur Air Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi Tentang Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar lebih peduli dengan masalah Infrastrukturnya yang ada di Pulau Sumatera.